

## BAB IV

### ANALISIS SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP IDEOLOGI POLITIK PARTAI GOLKAR

#### A. Analisis Ideologi Politik Partai Golkar

Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam sosial-politik.<sup>87</sup> Ideologi menjadi visi yang komprehensif dalam memandang sesuatu yang diformulasikan secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala metode pencapaiannya. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan, dan mampu diyakini menyelesaikan problematika kehidupan. Dalam hal ini, manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga teralienasi dan kehilangan identitasnya yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Ideologi adalah konsep yang sarat dengan konotasi politik dan tentu saja digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari dengan makna yang beragam pula.<sup>88</sup>

Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara keyakinan memunculkan

---

<sup>87</sup> Platform Kebijakan Pembangunan GOLKAR, Hal.30

<sup>88</sup> Arief Mudatsir Mandan, *Krisis Ideologi (Catatan Tentang Ideologi Politik Kaum Santri, Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP)*, 21

komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah dan darah perjuangan, sekaligus memompakan semangat rela berkorban.<sup>89</sup> Begitu juga ideologi sebuah partai politik akan memberikan arah perjuangan yang sesuai dengan ideologi partai tersebut. Seperti ideologi partai Golkar. Namun sebelum membahas ideologi partai Golkar, perlu dijelaskan masalah latar belakang dan perkembangan partai Golkar.

Partai PKI pada tahun Pada tahun 1955, merupakan hal yang sangat mengejutkan. ini di anggap merupakan ancaman bagi lawan politiknya, baik dari kalangan partai atau pun kelompok lain, khususnya militer.<sup>90</sup> Setelah tahun 1955 tersebut, Indonesia memasuki masa-masa kritis sekaligus menentukan dengan ketegangan fisik di berbagai daerah yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit karena sampai tahun 1959 berbagai kelompok yang berdebat di Majelis Konstituante tidak mampu menemukan jalan tengah untuk menentukan undang-undang dan dasar negara. Dengan dekrit ini, Presiden membubarkan Majelis Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara, dan mengumumkan bahwa era demokrasi liberal telah berakhir dan saatnya bangsa Indonesia memasuki sebuah masa yang ia namakan sebagai demokrasi yang terkontrol, yaitu Demokrasi

---

<sup>89</sup> Platform Kebijakan Pembangunan Partai GOLKAR Hal.30-31

<sup>90</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi, 2007), 461.

Terpimpin.<sup>91</sup> Politik Presiden Soekarno ini cenderung memberi ruang yang cukup pada pemenang Pemilu tahun 1955, sehingga iklim politik tersebut menguntungkan PKI untuk mengembangkan kekuatannya.

Inilah yang menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di pihak militer (AD).<sup>92</sup> Karena PKI dengan berbagai organisasi *Onderbouw*-nya semakin tumbuh besar dan berpengaruh.<sup>93</sup> Oleh karena itu dengan berbagai strategi dan taktik mereka mencoba menghalangi perluasan pengaruh PKI. Salah satu strategi yang dilakukan oleh militer adalah membentuk atau mendukung berbagai organisasi tandingan bagi organisasi-organisasi *onderbouw* PKI sebagai upaya meredam tindakan PKI.<sup>94</sup>

Pada pertengahan 1960-an Jenderal Nasution dan beberapa orang rekannya membuat suatu rencana untuk membentuk Sekber Golkar, sebuah organisasi yang akan digunakan untuk memelihara kekuatan kelompok anti-komunis.<sup>95</sup> Pada bulan Oktober 1964 terbentuk panitia yang terdiri dari anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer, untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”. Kemudian pada pukul 12 siang hari, 20 Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratigny

---

<sup>91</sup> John Maxwell, *Soe Hok Gie, Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), 67-79.

<sup>92</sup> Patmono Sk, dkk, *Golkar Baru dalam Fakta dan Opini-Buku I*, (Jakarta: Lembaga Studi Demokrasi, 2001), 15.

<sup>93</sup> Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer-Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 13.

<sup>94</sup> Patmono Sk, dkk, *Golkar Baru dalam Fakta dan Opini-Buku I*, (Jakarta: Lembaga Studi Demokrasi, 2001), 16.

<sup>95</sup> *Ibid.*, 269

(NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.<sup>96</sup> Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat sebagai Sekber Golkar resmi berdiri, Golkar pertama kali terbentuk dengan nama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama, Golongan Karya).

Golkar muncul sebagai organisasi politik dominan dalam pemilu 1971. Dan juga terjadi pada masa-masa pemilihan umum berikutnya. Terlebih setelah pada 16 Agustus 1982, Golkar selalu menjadi *Mainstream* yang tidak terkalahkan. Ini karena Golkar semenjak masa pemerintahan Orde Baru adalah merupakan partai pemerintah, ditambah lagi militer merupakan kekuatan politik yang dominan di dalam Golkar dan adanya tambahan kekuatan dari birokrat pada saat itu. Selain itu Golkar juga mendapat perlakuan istimewa pada pemerintahan saat itu dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya.<sup>97</sup>

Memasuki era reformasi, ketika rezim Orde Baru tumbang. Sebagai tulang punggung kekuasaan Orde Baru, Golkar menjadi sasaran kemarahan dari kelompok-kelompok masyarakat terutama yang merasa dirugikan oleh sistem yang dikembangkan selama Orde Baru. Mereka menuntut agar Golkar dibubarkan atau minimal tidak diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Berbagai macam tekanan politik pun dialamatkan kepada partai GOLKAR. Pada waktu itu Golkar di ambang

---

<sup>96</sup> Leo Surya Dinata, *Golkar dan Militer-Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992),. 15.

<sup>97</sup> Leo Surya Dinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, 145

kehancuran dan diprediksikan akan lenyap. Golkar menghadapi hujatan politik yang begitu dahsyat, termasuk ada yang menginginkan agar Golkar dilarang. Tantangan lain yang dihadapi Golkar pada era Reformasi adalah kuatnya tekanan eksternal yang menghendaki pembubaran Golkar.<sup>98</sup>

Runtuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun tentu saja berimbas kepada citra Golkar yang menjadi pendukung utama dan setia rezim orde baru tersebut. Citra negatif yang diberikan publik sering dikaitkan dengan karakteristik; bahwa Golkar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rezim Orde Baru, Golkar eksis dan besar karena kepemimpinan Soeharto. Hal ini tentu saja mempengaruhi perolehan suara Golkar pada pemilu di era Reformasi.<sup>99</sup>

Oleh karena itu, Pada Munas 1998, Golkar mengadakan pembaharuan dengan paradigma baru, yang bertujuan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Golkar baru bersifat reformis yang berbeda dengan Golkar lama dan memandang demokrasi sebagai suatu keniscayaan dengan visi barunya, yaitu: *Pertama*, Terbuka. *Kedua*, Mandiri. *Ketiga*, Demokratis. *Keempat*, Moderat. *Kelima*, Mengakar. Dan *Keenam*, Responsif.<sup>100</sup> Munas Golkar 1998 memberikan ruang wacana bagi berkembangnya konsep paradigma baru sebagai respons Golkar yang mendasar terhadap perkembangan politik yang terjadi di era reformasi. Inti dari paradigma baru tersebut adalah mengharapkan Golkar dibangun dengan nilai-nilai baru selaras

---

<sup>98</sup> Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 86

<sup>99</sup> Aulia Rachman, *Citra Khalayak Tentang Golkar: Peta Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004*, (Jakarta: PSAP 2006), 2

<sup>100</sup> *Ibid*, 9-10

dengan tuntutan reformasi, dan menjadikan dirinya sebagai partai politik yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid, mengakar dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa dan Negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten.<sup>101</sup>

pada Pemilu 1999 Partai Golkar memperoleh 23.741.758 suara (22,44%) sehingga menduduki 120 kursi DPR. Berhasil menempati urutan kedua setelah PDI-P yang memperoleh 33% suara. Dengan komposisi itu, berarti Partai Golkar telah melewati masa kritis yang dialaminya.<sup>102</sup>

Di tengah begitu banyaknya partai politik pada pemilu 1999 dan 2004, mesin politik Golkar relatif jauh lebih baik di banding Parpol-Parpol lain. Ini terbukti ketika partai Golkar kembali mengikuti pemilu 2004, yang menempatkannya pada urutan pertama di dalam perolehan suara (21,58%). Dan menempatkan kembali Golkar menjadi partai besar di Indonesia.<sup>103</sup> Partai Golkar mengarahkan seluruh perjuangannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia dalam 5 (lima) aspek kehidupan.

---

<sup>101</sup> Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 198

<sup>102</sup> H. Saifullah Yusuf, Belajar Pada Golkar, 2003(<http://www.polarhome.com/pipermadlnavonal-m/2003>), diakses pada 20 Oktober 2008

<sup>103</sup> Aulia Rahman, *Citra Khalayak Tentang Golkar:Peta Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004*, 25

Pertama, ideologi; dalam aspek ideologi Partai Golkar akan terus konsisten menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan Pancasila dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, politik Golkar mengarahkan arah politiknya demi terbangunnya kesejahteraan rakyat dengan nilai-nilai dan doktrin Pancasila yang sudah menjadi acuan dalam melaksanakan kesejahteraan rakyat. Ketiga, ekonomi Golkar mengarahkan pembangunan ekonomi berdasarkan sumberdaya ekonomi nasional, memanfaatkan globalisasi dan menangkal dampak negatifnya, menjunjung tinggi kaidah-kaidah perekonomian dunia, bagi terciptanya kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Atas prinsip tersebut Partai Golkar akan menggunakan strategi *double track* yaitu ekonomi rakyat pada downstream dan sistem ekonomi pasar sebagai *upstream*. Mengedepankan pembangunan ekonomi rakyat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam bentuk sistem perekonomian rakyat yang dilaksanakan dengan memberdayakan sepenuhnya kemampuan masyarakat luas serta mendayagunakan sumber daya alam lingkungan sebagai basis kekuatan perekonomian negara.

Keempat, sosial-Budaya; Kondisi sosial budaya yang diharapkan terwujud adalah terciptanya kondisi masyarakat yang memberikan penghargaan terhadap profesionalisme (karya dan kekaryaan) yang menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai-nilai agama. Sebagai bangsa yang majemuk, Partai Golkar berkeyakinan untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa agar menjadi bangsa yang kuat

(*strong nation*) dan mulia dengan ciri masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin yang tangguh, dan etika yang terpuji.

Kelima, pertahanan/keamanan; Partai Golkar berjuang untuk mewujudkan kondisi pertahanan dan keamanan yang menempatkan ketahanan bangsa sebagai basis pertahanan dan keamanan negara yang tujuannya adalah mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu Partai Golkar akan membangun unsur-unsur ketahanan bangsa yaitu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan hankam sendiri secara bersama-sama dan seimbang. Pembangunan aspek pertahanan dan keamanan ditujukan untuk mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan pada wawasan kebangsaan.

Dari uraian latar belakang dan perkembangan perjalanan partai Golkar di atas penulis dapat menganalisa bahwa: Pertama, lahirnya Partai tidak bisa lepas dari adanya Partai komunis Indonesia (PKI) yang pada waktu itu di bawah kordinasi pemerintahan orde lama dan memperluas pengaruhnya atas bantuan pemerintah orde lama. Sehingga dengan adanya perluasan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) Harun Nasution dan teman-temannya membentuk SEKBER (Sekretaris Bersama) Golkar. Kedua, dalam sejarah pemilihan umum, pada Pemilu 1999 Partai Golkar



menjadi partai pemenang kedua setelah PDIP. Partai Golkar memperoleh 23.741.758 suara (22,44%) sehingga menduduki 120 kursi DPR. Berhasil menempati urutan kedua setelah PDI-P yang memperoleh 33% suara. Dan pada dan 2004, partai Golkar kembali menempati urutan pertama dengan perolehan suara (21,58%). Ketiga, kemenangan yang diperoleh oleh partai Golkar itu tidak bisa lepas dari strategi dan taktik politik dan arah perjuangannya dalam mengambil hati masyarakat, hal itu tidak bisa lepas dari ideologi partai Golkar, dimana ideologi Partai Golkar adalah konsisten menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan Pancasila dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **B. Analisis Ideologi Politik Partai Golkar dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah**

Lahirnya Partai Golkar tidak bisa lepas dari adanya Partai komunis Indonesia (PKI) yang pada waktu itu di bawah kordinasi pemerintahan orde lama dan memperluas pengaruhnya atas bantuan pemerintah orde lama. Sehingga pada saat itu terjadi ketegangan di daerah untuk menentang pemerintah pusat. Dan dalam sejarah pemilihan umum, pada Pemilu 1999 Partai Golkar menjadi partai pemenang kedua setelah PDIP. Partai Golkar memperoleh 23.741.758 suara (22,44%) sehingga menduduki 120 kursi DPR. Berhasil menempati urutan kedua setelah PDI-P yang memperoleh 33% suara. Dan pada dan 2004, partai Golkar kembali menempati urutan pertama dengan perolehan suara (21,58%).

Dan kemenangan yang diperoleh oleh partai Golkar tersebut tidak bisa lepas dari strategi dan taktik politik dan arah perjuangannya dalam mengambil hati masyarakat dengan ideologi partainya, yaitu konsisten menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan Pancasila dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan doktrin Karya Kekaryaan, yaitu karya Siaga Gatra Praja, yang dapat dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Maka Partai Golkar selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, dan ajaran. Dan dengan doktrin itu Partai Golkar berorientasi pada program dan atau pemecahan masalah, bukan berorientasi pada aliran atau ideologi.<sup>104</sup>

Dan Partai Golkar tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Karena hal itu dikhawatirkan akan melahirkan konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan integritas bangsa. Oleh karena itu doktrin Partai Golkar ini senantiasa prihatin menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan tidak sehat di antara berbagai partai politik yang membawa terjadinya konflik dan pertentangan politik yang tajam. Masing-masing partai politik berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit, sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut, bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita

---

<sup>104</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, *Hasil Munas VIII Partai GOLKAR Tahun 2009*, (Pekan Baru-Riau: 2009), 60.

proklamasi. Dalam suasana seperti itu Partai Golkar tampil dengan Doktrin Karya Kekaryaannya karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa.<sup>105</sup>

Dan juga dengan Platform Partai Golkar yang berpijak pada landasan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Maka Partai Golkar berwawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu. Dan ini adalah cara pandang yang mengatasi golongan dan kelompok baik atas dasar agama, suku, etnis, maupun budaya. Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus dihimpun secara sinergis dan dikembangkannya sehingga menjadi kekuatan nasional yang kuat dan besar.<sup>106</sup>

Partai Golkar terbuka bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan partai Golkar diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam Rekrutmen kader untuk kepemimpinan dan penempatan pada posisi-posisi politik.<sup>107</sup> Ideologi merupakan hal wajib bagi partai politik, dengan ideologinya sebuah partai politik akan terlihat bentuknya. Ideologi digunakan sebagai arah ataupun ukuran kemudian ketika menyikapi persoalan yang

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, 61

<sup>106</sup> *Ibid.*, 67

<sup>107</sup> *Ibid.*, 68

ada di dalam masyarakat. Di dalam ideologi terkandung hal-hal yang sifatnya formal dan ideal tentang banyak hal, ideologi akan menyangkut bagaimana ekonomi dan politik itu akan dijalankan, bagaimana distribusi nilai-nilai itu akan dilakukan. Nilai-nilai di sini berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ketenangan, kenyamanan masyarakat yang akan diciptakan ketika partai tersebut mendapatkan kekuasaan.<sup>108</sup>

Berdasarkan kajian terhadap sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan sunnah, setiap muslim meyakini bahwa kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan yang sangat jelas. Skema kehidupan ini bermakna bahwa masyarakat yang harus dibangun oleh setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya tentang nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan.<sup>109</sup>

Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun sekaligus membentuk masyarakat yang sadar akan Hukum yang oleh nabi disebut dengan masyarakat Tumaddin atau lebih populer disebut oleh pakar kontemporer dengan sebutan Masyarakat Madani. Hal tersebut dituangkan oleh nabi dalam Bentuk naskah yang dikenal dengan Pakta Madinah atau Piagam madinah (Shahifatul Madinah). Dalam piagam tersebut nabi menjelaskan bahwasannya tidak

---

<sup>108</sup> [http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last\\_36\\_46.pdf](http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_36_46.pdf)

<sup>109</sup> Deliar Noer, "*Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas*" (dalam Prisma, No.5 Thn. XVII, 1988), 3

ada Diskriminasi di mata Hukum, siapapun yang melakukan kesalahan harus mendapat Sanksi Hukum tanpa melihat darimana Qabilah. Agama dan keturunan. Sehingga masyarakat pada waktu itu sangat menghargai kebersamaan dalam membangun sebuah peradapan hal itupun terinspirasi dari isi Piagam madinah Pasal I yang berbunyi

انهم امة واحدة من دون الناس.

“*Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain*”.<sup>110</sup>

Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan suatu tuntutan terhadap umat Islam yakni Islam dalam artian sebagai Nilai Bukan terbentuk secara Formal. Lebih memperjelas masalah dengan mengutip ungkapan yang ditulis oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam*, bahwa bukan hanya sistem teologi, lebih dari itu Islam merupakan *complete civilization*, dengan nada yang konfirmatif Nasir mengatakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan.<sup>111</sup>

Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami. Dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar’iyyah*, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa nilai

<sup>110</sup> <http://arsiparmansyah.wordpress.com/2012/10/14/isi-piagam-madinah/>

<sup>111</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syarî’ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 25-40.

(organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh.<sup>112</sup>

Politik islam mengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari *Kemafsadatan*, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.<sup>113</sup> Dan dalam Islam tidak ada perintah untuk mendirikan suatu negara Islam oleh Rasulullah.

Oleh karena itu, kalau kita lihat dari adanya ideologi partai Golkar yaitu “konsisten menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan Pancasila dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” Perspektif fiqh siyasah atau *Siyasah Syar'iyah*. Penulis dapat menganalisa:

Pertama, bahwa al-Qur'an dan hadits memberikan skema kehidupan yang harus dibangun oleh setiap muslim yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya tentang nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan. Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan suatu tuntutan terhadap umat Islam. Dalam islam sistem tata negara tidak memerintahkan mendirikan sistem negara islam secara formal, akan tetapi islam hanya memerintahkan cara hubungan manusia dengan

---

<sup>112</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 154

<sup>113</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2007), 12

allah, dan hubungan manusia dengan manusia serta cara pergaulan antara sesama manusia dalam aktivitas sehari-harinya.

Kedua, ideologi Pancasila ketika kita melihat dari tiap-tiap sila yang terkandung di dalamnya, dikaitkan dengan ajaran al-Qur'an. Oleh karena itu, Pancasila dengan Islam perumusan pancasila bukan kelihatan sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al Qur'an, didalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada isi al-qur'an.